Dayah sebagai Modal Sosial dalam Membangun Ketahanan Masyarakat

Fiza Syamsuddin[1], Nurhamijah[2], Sartika Raida[3]
[1,2,3]Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat, Indonesia
Email Korespondensi: fiza@staidarulhikmah.ac.id

Abstrak

Dayah, sebutan pesantren di Aceh, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis dayah sebagai modal sosial, mengidentifikasi kontribusinya terhadap ketahanan masyarakat, serta merumuskan konsep penguatan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis isi (content analysis) terhadap literatur mengenai modal sosial, ketahanan masyarakat, pesantren, dan dayah di Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa dayah menyediakan tiga unsur modal sosial, yaitu jaringan yang terbangun melalui hubungan guru, santri, alumni, dan masyarakat; kepercayaan yang bersumber dari keilmuan dan keteladanan teungku; serta norma dan nilai keagamaan yang memandu perilaku bersama. Ketiganya berkontribusi pada ketahanan masyarakat melalui pembinaan moral, penggerakan tindakan kolektif, penyelesaian masalah sosial, dan dukungan ketika masyarakat menghadapi krisis. Artikel ini menawarkan konsep penguatan dayah sebagai modal sosial dengan empat komponen: penjagaan kepercayaan dan keteladanan, perluasan jaringan, penguatan kelembagaan dayah, serta kemitraan dengan pemerintah gampong dan pihak lain. Kajian ini menyimpulkan bahwa kekuatan dayah sebagai modal sosial perlu dijaga dan dikembangkan dengan tetap berpijak pada nilai dan tradisinya.

***Keywords**: Dayah, Modal Sosial, Ketahanan Masyarakat, Aceh, Pesantren*

Abstract

Dayah, the Acehnese term for pesantren, functions not only as an educational institution but also as a centre of social and religious life. This article aims to analyze dayah as social capital, to identify its contribution to community resilience, and to formulate a concept for strengthening that role. Using library research with a qualitative-descriptive approach and content analysis of literature on social capital, community resilience, pesantren, and dayah in Aceh, the study finds that dayah provides three elements of social capital: networks built through relations among teachers, students, alumni, and the community; trust rooted in the knowledge and exemplary conduct of the teungku; and religious norms and values that guide collective behaviour. These elements contribute to community resilience through moral guidance, mobilization of collective action, resolution of social problems, and support in times of crisis. The article proposes a concept for strengthening dayah as social capital with four components: safeguarding trust and exemplarity, expanding networks, strengthening dayah institutions, and partnership with village governments and other parties. It concludes that the strength of dayah as social capital should be preserved and developed while remaining grounded in its values and traditions.

***Keywords**: Dayah, Social Capital, Community Resilience, Aceh, Pesantren*

Pendahuluan

Ketahanan masyarakat menjadi isu penting bagi daerah yang pernah menghadapi tekanan besar, seperti Aceh. Masyarakat Aceh melewati konflik yang panjang dan bencana alam, sehingga kemampuan untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi tidak hanya bergantung pada bantuan dan kebijakan, tetapi juga pada kekuatan hubungan sosial di dalam masyarakat

itu sendiri. Kajian tentang pemulihan pascabencana menunjukkan bahwa kekuatan jaringan, kepercayaan, dan norma kebersamaan menentukan seberapa baik masyarakat dapat pulih (Aldrich, 2012; Aldrich & Meyer, 2015). Kekuatan hubungan sosial inilah yang dalam ilmu sosial dikenal sebagai modal sosial (Putnam et al., 1993; Putnam, 2000; Coleman, 1988).

Di Aceh, salah satu lembaga yang menyimpan modal sosial tersebut adalah dayah, sebutan untuk pesantren di Aceh. Dayah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan dipimpin oleh teungku yang dihormati karena keilmuan dan akhlaknya (Dhofier, 2011; Amiruddin, 2013). Dalam kajian tentang pesantren, lembaga ini dipahami tidak hanya sebagai tempat belajar kitab, tetapi juga sebagai pusat pembinaan nilai dan kehidupan sosial masyarakat sekitar (Mastuhu, 1994; Bruinessen, 1995). Pengakuan negara terhadap peran tersebut tampak pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

Beberapa kajian telah memperlihatkan peran agama dan dayah sebagai modal sosial di Aceh. Kajian tentang agama dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat menjadi modal sosial yang menopang ketahanan (Kasim et al., 2021). Kajian tentang gerakan pemberantasan narkoba di Ujong Pacu, Lhokseumawe, memperlihatkan bahwa teungku dayah mampu menggerakkan warga berkat modal sosial keagamaan yang mengikat masyarakat (Nirzalin & Febriandi, 2020). Di luar Aceh,

kajian tentang pesantren juga menunjukkan bahwa nilai-nilai pesantren dapat diolah menjadi modal sosial (Syamsuri et al., 2023). Namun, kajian-kajian tersebut cenderung membahas satu peristiwa, satu aspek, atau satu lokasi. Berdasarkan penelusuran penulis, pembahasan yang memetakan dayah sebagai modal sosial secara menyeluruh dan menghubungkannya dengan ketahanan masyarakat masih perlu diperkuat.

Kajian ini penting karena menawarkan cara pandang yang tidak menempatkan dayah semata sebagai lembaga pendidikan. Jika dayah dipahami sebagai modal sosial, kekuatan yang selama ini tumbuh secara alami di tengah masyarakat dapat dikenali, dirawat, dan dihubungkan dengan upaya membangun ketahanan, baik dalam menghadapi bencana, persoalan sosial, maupun perubahan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana dayah dipahami sebagai modal sosial? Kedua, bagaimana modal sosial dayah berkontribusi pada ketahanan masyarakat? Ketiga, bagaimana konsep penguatan dayah sebagai modal sosial bagi ketahanan masyarakat? Hasil kajian diharapkan memberi kerangka bagi pengelola dayah, pemerintah gampong, dan pembuat kebijakan dalam memahami serta memperkuat peran dayah.

Tinjauan Pustaka

Konsep Modal Sosial

Modal sosial dipahami secara beragam. Bourdieu (1986) memandangnya sebagai sumber daya yang melekat pada

keanggotaan dalam jaringan hubungan yang bertahan lama. Coleman (1988) menekankan fungsi modal sosial dalam memudahkan tindakan melalui kewajiban dan harapan timbal balik, saluran informasi, serta norma yang disertai sanksi. Putnam et al. (1993) dan Putnam (2000) menekankan jaringan, norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan bersama. Fukuyama (2001) memandang modal sosial sebagai norma informal yang mendorong kerja sama, dengan kepercayaan sebagai unsur pentingnya.

Woolcock dan Narayan (2000) merangkum perkembangan kajian modal sosial ke dalam beberapa sudut pandang, antara lain yang menekankan komunitas, jaringan, kelembagaan, dan sinergi. Szreter dan Woolcock (2004) membedakan tiga bentuk modal sosial, yaitu *bonding*, *bridging*, dan *linking*. *Bonding* menghubungkan orang-orang dari kelompok yang serupa, *bridging* menghubungkan kelompok yang berbeda, dan *linking* menghubungkan masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan atau sumber daya lebih besar. Pembedaan ini berguna untuk membaca dayah, yang memiliki ikatan kuat di dalam komunitasnya sekaligus berpotensi menghubungkan masyarakat dengan pihak luar.

Modal sosial juga tidak selalu bernilai positif. Gelderblom (2018) mengingatkan bahwa upaya menjembatani kelompok dipengaruhi oleh relasi kuasa dan konteks sosial, sedangkan Fukuyama (2001) mencatat bahwa kepercayaan yang hanya berlaku dalam lingkaran kecil dapat membatasi kerja sama yang lebih luas. Kajian tentang pengukuran modal sosial

menunjukkan bahwa konsep ini sangat luas sehingga perlu ada kejelasan tentang dimensi yang dibahas (Engbers et al., 2017). Karena itu, artikel ini membatasi pembahasan pada tiga dimensi utama, yaitu jaringan, kepercayaan, dan norma.

Ketahanan Masyarakat

Ketahanan masyarakat dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih ketika menghadapi gangguan. Norris et al. (2008) memandang ketahanan komunitas sebagai seperangkat kapasitas adaptif yang mencakup pengembangan ekonomi, modal sosial, informasi dan komunikasi, serta kompetensi komunitas. Dalam kerangka ini, modal sosial adalah salah satu kapasitas yang menopang ketahanan. Aldrich (2012) menunjukkan melalui perbandingan beberapa kasus bencana bahwa modal sosial merupakan faktor penting dalam pemulihan pascabencana, dan Aldrich dan Meyer (2015) menguraikan peran ikatan, jembatan, dan tautan sosial dalam ketahanan komunitas.

Di Aceh, kajian di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa nilai-nilai agama seperti tauhid, kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan kebersamaan berfungsi sebagai modal sosial yang disosialisasikan melalui keluarga dan tokoh agama melalui pendidikan (Kasim et al., 2021). Temuan ini penting karena menghubungkan langsung modal sosial berbasis agama dengan ketahanan masyarakat Aceh, sekaligus membuka ruang untuk menelaah peran lembaga keagamaan seperti dayah.

Dayah dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh

Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh yang memiliki unsur-unsur khas pesantren, yaitu pondok sebagai tempat tinggal santri, masjid, santri, pengajaran kitab klasik, dan pimpinan yang dihormati, yang di Aceh dikenal sebagai teungku (Dhofier, 2011; Bruinessen, 1995; Nirzalin & Febriandi, 2020). Kajian tentang pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini berperan di luar pengajaran, antara lain dalam pembinaan nilai dan kehidupan masyarakat sekitar (Mastuhu, 1994; Dhofier, 2011).

Kajian kontemporer memperlihatkan bahwa nilai-nilai pesantren, seperti keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan persaudaraan, dapat diolah menjadi modal sosial yang menopang jejaring dan kerja sama, sebagaimana dikaji pada Pondok Modern Darussalam Gontor (Syamsuri et al., 2023). Di Aceh, dayah juga menjadi bagian dari tatanan pendidikan yang diatur secara khusus melalui qanun, di samping berada dalam kerangka undang-undang tentang pesantren (Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019). Sementara itu, perubahan zaman menuntut pesantren bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya (Suwar & Khairul Ichsan, 2024; Rahmaini & Suriyani, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Studi kepustakaan dipilih karena tujuan penelitian adalah memetakan

dan merumuskan konsep melalui telaah literatur, bukan mengukur ketahanan masyarakat di lapangan (Zed, 2004). Pendekatan ini sesuai untuk membandingkan dan mensintesis berbagai sumber (Snyder, 2019).

Sumber data meliputi buku dan artikel jurnal mengenai modal sosial, ketahanan masyarakat, pesantren, dan dayah di Aceh, termasuk regulasi tentang pesantren dan pendidikan dayah. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas, dan kemutakhirannya, dengan fokus pada publikasi hingga tahun 2024. Teori-teori dasar modal sosial dan ketahanan komunitas dimanfaatkan sebagai landasan konseptual, sedangkan kajian tentang pesantren dan Aceh dimanfaatkan untuk memahami konteks.

Data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) (Krippendorff, 2004) melalui lima tahapan: (1) identifikasi literatur yang relevan, (2) pengodean tema utama, yaitu unsur modal sosial dayah, kontribusi bagi ketahanan masyarakat, dan tantangan, (3) klasifikasi temuan berdasarkan tema, (4) sintesis konsep penguatan dengan merujuk pembedaan *bonding*, *bridging*, dan *linking* serta kerangka kapasitas ketahanan komunitas, dan (5) penarikan kesimpulan. Keabsahan dijaga melalui triangulasi teoritis, yaitu membandingkan pandangan dari beberapa sumber. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan, sehingga konsep yang dihasilkan bersifat konseptual dan perlu diuji secara empiris.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Dayah sebagai Sumber Modal Sosial: Jaringan, Kepercayaan, dan Norma

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa dayah menyediakan tiga unsur modal sosial. Unsur pertama adalah jaringan. Dayah menghubungkan teungku, santri, wali santri, alumni, dan masyarakat sekitar dalam hubungan yang berlangsung lama, sebab belajar di dayah melibatkan kebersamaan yang intensif dan ikatan guru-murid yang berlanjut setelah santri lulus (Dhofier, 2011; Mastuhu, 1994). Kajian tentang pesantren menunjukkan bahwa jaringan alumni dan kerja sama antarlembaga merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah pesantren (Syamsuri et al., 2023).

Unsur kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat kepada dayah bersumber dari keilmuan dan akhlak teungku, bukan dari jabatan formal semata (Dhofier, 2011; Mastuhu, 1994). Kajian di Ujong Pacu memperlihatkan bahwa teungku dayah mampu menggerakkan warga karena ikatan keagamaan yang melahirkan kepercayaan di antara mereka (Nirzalin & Febriandi, 2020). Kepercayaan ini penting karena menurut Fukuyama (2001) kepercayaan merupakan unsur kunci yang memudahkan kerja sama.

Unsur ketiga adalah norma dan nilai. Dayah menanamkan adab, keikhlasan, kesederhanaan, dan kebersamaan sebagai

pedoman perilaku (Syamsuri et al., 2023). Di Aceh, nilai-nilai seperti tauhid, kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan kebersamaan telah disosialisasikan melalui keluarga dan tokoh agama dalam pendidikan, dan berfungsi sebagai modal sosial yang menopang ketahanan (Kasim et al., 2021). Jika dikaitkan dengan pembedaan Szreter dan Woolcock (2004), ikatan di antara santri, alumni, dan warga di sekitar dayah tergolong *bonding*, hubungan dayah dengan lembaga atau kelompok lain tergolong *bridging*, dan hubungan dayah dengan pemerintah serta lembaga pembina tergolong *linking*.

b. Kontribusi Dayah terhadap Ketahanan Masyarakat

Literatur menunjukkan beberapa bentuk kontribusi dayah terhadap ketahanan masyarakat. Pertama, pembinaan moral dan pendidikan. Melalui pengajaran dan keteladanan, dayah menanamkan nilai yang menjadi bekal masyarakat menghadapi kesulitan, seperti kesabaran dan kebersamaan (Kasim et al., 2021; Mastuhu, 1994). Kedua, penggerakan tindakan kolektif. Pengalaman di Ujong Pacu menunjukkan bahwa teungku dayah dapat memimpin gerakan warga melawan peredaran narkoba dengan memanfaatkan modal sosial keagamaan (Nirzalin & Febriandi, 2020).

Ketiga, rujukan dan penyelesaian masalah sosial. Karena dihormati, teungku dan lingkungan dayah umumnya menjadi tempat masyarakat meminta nasihat dan penengah dalam persoalan keagamaan dan sosial (Dhofier, 2011; Mastuhu, 1994). Keempat, dukungan ketika masyarakat menghadapi krisis. Kerangka ketahanan komunitas menempatkan modal sosial

sebagai kapasitas yang membantu masyarakat bertahan dan pulih (Norris et al., 2008; Aldrich, 2012), sehingga ikatan dan nilai yang dirawat dayah dapat berfungsi sebagai sumber dukungan saat bencana atau tekanan sosial. Kelima, dukungan bagi penguatan ekonomi sekitar. Kajian pada pesantren menunjukkan bahwa pengembangan usaha pesantren dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar (Syamsuri et al., 2023). Penghubungan antara dayah dan ketahanan yang diuraikan pada poin ketiga dan keempat merupakan sintesis penulis berdasarkan literatur, bukan hasil pengukuran lapangan.

c. Tantangan Dayah sebagai Modal Sosial

Literatur juga mengisyaratkan sejumlah tantangan. Pertama, keragaman dayah. Dayah berbeda dalam ukuran, sumber daya, dan orientasi, sehingga kekuatan modal sosialnya tidak seragam (Rahmaini & Suriyani, 2024). Kedua, keterbatasan tata kelola dan sumber daya manusia. Kajian tentang pengembangan usaha pesantren menunjukkan bahwa persoalan manajemen dan kualitas sumber daya manusia menjadi kendala yang menonjol (Syamsuri et al., 2023). Ketiga, perubahan zaman yang menuntut pesantren bertransformasi tanpa kehilangan identitasnya (Suwar & Khairul Ichsan, 2024).

Keempat, risiko modal sosial yang terlalu tertutup. Kepercayaan yang hanya berlaku di lingkaran kecil dapat membatasi kerja sama yang lebih luas (Fukuyama, 2001), dan upaya menjembatani kelompok dipengaruhi oleh relasi kuasa serta konteks sosial (Gelderblom, 2018). Kelima, ketergantungan pada figur. Karena kepercayaan banyak bersumber dari pribadi

teungku, kesinambungan modal sosial dapat terganggu apabila peralihan kepemimpinan tidak dipersiapkan dengan baik. Poin kelima ini merupakan analisis penulis yang perlu diuji secara empiris.

2. Pembahasan

a. Dayah sebagai Modal Sosial: Bonding, Bridging, dan Linking

Temuan di atas menunjukkan bahwa dayah dapat dipahami sebagai lembaga yang menghasilkan sekaligus merawat modal sosial. Jaringan, kepercayaan, dan norma tidak hadir sebagai program yang terpisah, melainkan tumbuh dari kehidupan sehari-hari dayah: belajar bersama, hidup bersama, dan meneladani guru. Hal ini sejalan dengan gagasan Coleman (1988) bahwa modal sosial lahir dari hubungan yang menciptakan kewajiban, harapan, dan norma bersama, serta dengan pandangan Putnam et al. (1993) tentang peran jaringan dan kepercayaan dalam kerja sama.

Dengan kerangka *bonding*, *bridging*, dan *linking* (Szreter & Woolcock, 2004), kekuatan utama dayah tampak pada *bonding*, yaitu ikatan yang erat di antara santri, alumni, dan masyarakat sekitar. Kekuatan ini menjelaskan mengapa dayah dapat menggerakkan warga, seperti pada kasus Ujong Pacu (Nirzalin & Febriandi, 2020). Namun, ketahanan masyarakat tidak cukup dibangun dengan *bonding* saja. Kapasitas ketahanan juga mencakup informasi, komunikasi, dan kompetensi komunitas (Norris et al., 2008), yang dalam praktiknya memerlukan hubungan dengan pihak luar. Karena itu, *bridging*

dengan kelompok lain dan *linking* dengan pemerintah gampong serta lembaga pembina menjadi penting untuk memperluas dampak dayah.

Konteks Aceh memberi bobot tambahan pada pembahasan ini. Masyarakat yang pernah menghadapi bencana besar dan konflik membutuhkan sumber ketahanan yang bersifat sosial dan nilai, tidak hanya sumber daya fisik dan ekonomi. Kajian di Banda Aceh menunjukkan bahwa nilai agama yang disosialisasikan melalui keluarga dan tokoh agama menopang ketahanan (Kasim et al., 2021). Dayah, sebagai tempat nilai itu diajarkan secara sistematis dan diteladankan oleh teungku, dapat dipandang sebagai salah satu simpul penting dalam proses tersebut, meskipun peran ini perlu dikaji lebih lanjut secara empiris.

Pembahasan ini juga menegaskan perlunya sikap hati-hati. Modal sosial yang kuat di dalam kelompok dapat menjadi tertutup apabila tidak diimbangi keterhubungan dengan pihak lain (Fukuyama, 2001; Gelderblom, 2018). Bagi dayah, hal ini berarti bahwa kekuatan tradisi perlu dijaga bersamaan dengan keterbukaan untuk bekerja sama. Keterbukaan tersebut tidak berarti meninggalkan tradisi, melainkan menempatkan nilai-nilai dayah sebagai dasar kerja sama dengan pihak lain.

b. Konsep Penguatan Dayah sebagai Modal Sosial untuk Ketahanan Masyarakat

Berdasarkan sintesis temuan, artikel ini merumuskan konsep penguatan dayah sebagai modal sosial untuk ketahanan masyarakat yang terdiri atas empat komponen. Konsep ini

merupakan hasil sintesis konseptual dan belum diuji secara empiris.

Komponen pertama adalah penjagaan kepercayaan dan keteladanan. Karena kepercayaan masyarakat bersumber dari keilmuan dan akhlak teungku, dayah perlu menjaga mutu keilmuan dan keteladanan para pengasuh dan pengajarnya, serta menyiapkan regenerasi kepemimpinan agar kepercayaan tidak bergantung pada satu figur (Dhofier, 2011; Mastuhu, 1994). Komponen kedua adalah perluasan jaringan. Dayah dapat merawat jaringan alumni, menjalin kerja sama dengan dayah lain, dan membuka komunikasi dengan kelompok masyarakat di sekitarnya, sehingga *bonding* diperkuat oleh *bridging* (Syamsuri et al., 2023; Szreter & Woolcock, 2004).

Komponen ketiga adalah penguatan kelembagaan dayah. Dayah memerlukan tata kelola dan sumber daya manusia yang baik agar peran sosialnya berkelanjutan, termasuk pengelolaan usaha atau sumber pembiayaan yang tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai lembaga ilmu (Syamsuri et al., 2023; Suwar & Khairul Ichsan, 2024). Komponen keempat adalah kemitraan dengan pemerintah gampong dan pihak lain. Hubungan *linking* ini dapat diwujudkan melalui pelibatan dayah dalam perencanaan dan kegiatan gampong, serta pemanfaatan dukungan kebijakan yang tersedia, seperti kerangka Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, dengan tetap menjaga kemandirian dan identitas dayah.

Penerapan konsep ini sebaiknya mengikuti beberapa prinsip. Pertama, dimulai dari kekuatan yang sudah dimiliki

dayah, bukan dari program baru yang asing bagi tradisinya. Kedua, bersifat bertahap, dengan langkah sederhana seperti forum silaturahmi alumni atau pertemuan berkala antara dayah dan pemerintah gampong. Ketiga, menghormati otonomi dayah dalam menentukan arah pendidikannya.

Keempat komponen tersebut saling terkait dan sejalan dengan kapasitas ketahanan komunitas (Norris et al., 2008). Penjagaan kepercayaan dan keteladanan memperkuat modal sosial dan kompetensi komunitas, perluasan jaringan memperkuat informasi dan komunikasi, penguatan kelembagaan menopang keberlanjutan, dan kemitraan menghubungkan dayah dengan sumber daya lain, termasuk dukungan pengembangan ekonomi.

c. Implikasi dan Tantangan Penerapan

Secara praktis, konsep ini mengimplikasikan bahwa pemerintah gampong dan pembuat kebijakan perlu memandang dayah sebagai mitra, bukan sekadar objek pembinaan. Perencanaan gampong, misalnya, dapat melibatkan dayah dalam kegiatan pembinaan moral, penanganan masalah sosial, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Bagi dayah, konsep ini menegaskan bahwa kegiatan menjaga keilmuan, adab, dan keteladanan merupakan bagian dari kontribusi sosial dayah, bukan terpisah darinya.

Beberapa tantangan perlu diperhatikan. Pertama, keragaman dayah dalam sumber daya dan orientasi, sehingga penerapan perlu disesuaikan. Kedua, risiko menjadikan dayah sekadar alat program pihak luar, yang dapat mengikis

kepercayaan masyarakat apabila dayah dipandang kehilangan kemandirian. Ketiga, kesulitan mengukur modal sosial karena konsepnya luas (Engbers et al., 2017). Keempat, keterbatasan bukti empiris mengenai bagaimana modal sosial dayah bekerja pada berbagai bentuk krisis. Karena kajian ini bersifat kepustakaan, penelitian lanjutan berbasis lapangan di dayah dan gampong diperlukan untuk menguji serta menyempurnakan konsep ini.

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa dayah dapat dipahami sebagai modal sosial yang menyediakan tiga unsur, yaitu jaringan yang terbangun melalui hubungan guru, santri, alumni, dan masyarakat; kepercayaan yang bersumber dari keilmuan dan keteladanan teungku; serta norma dan nilai keagamaan yang memandu perilaku bersama. Dari sudut pandang *bonding*, *bridging*, dan *linking*, kekuatan utama dayah terletak pada *bonding*, sementara *bridging* dan *linking* masih perlu diperluas.

Modal sosial tersebut berkontribusi pada ketahanan masyarakat melalui pembinaan moral, penggerakan tindakan kolektif, rujukan dan penyelesaian masalah sosial, dukungan ketika menghadapi krisis, serta penguatan ekonomi sekitar. Namun, kontribusi ini menghadapi tantangan berupa keragaman dayah, keterbatasan tata kelola dan sumber daya, tuntutan perubahan zaman, risiko modal sosial yang tertutup, dan ketergantungan pada figur.

Artikel ini menawarkan konsep penguatan dayah sebagai modal sosial dengan empat komponen: penjagaan kepercayaan dan keteladanan, perluasan jaringan, penguatan kelembagaan dayah, serta kemitraan dengan pemerintah gampong dan pihak lain. Penelitian lanjutan berupa studi lapangan di dayah dan gampong diperlukan untuk menguji konsep ini, termasuk mengkaji bagaimana modal sosial dayah bekerja pada berbagai bentuk krisis.

Daftar Pustaka

Aldrich, D. P. (2012). *Building resilience: Social capital in post-disaster recovery*. University of Chicago Press.

Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist, 59*(2), 254–269. https://doi.org/10.1177/0002764214550299

Amiruddin, M. H. (2013). *Dayah 2050: Menatap masa depan dayah di era transformasi ilmu dan gerakan keagamaan*. Hexagon.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.

Bruinessen, M. van. (1995). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology, 94*(Supplement), S95–S120. https://doi.org/10.1086/228943

Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES.

Engbers, T. A., Thompson, M. F., & Slaper, T. F. (2017). Theory and measurement in social capital research. *Social Indicators Research, 132*(2), 537–558. https://doi.org/10.1007/s11205-016-1299-0

Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly, 22*(1), 7–20.

Gelderblom, D. (2018). The limits to bridging social capital: Power, social context and the theory of Robert Putnam. *The Sociological Review, 66*(6), 1309–1324. https://doi.org/10.1177/0038026118765360

Kasim, F. M., Nurdin, A., & Rizwan, M. (2021). Agama, modal sosial dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kota Banda Aceh. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 23*(1), 66–73. https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p66-73.2021

Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). Sage Publications.

Mastuhu. (1994). *Dinamika sistem pendidikan pesantren: Suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren*. INIS.

Nirzalin, N., & Febriandi, Y. (2020). Teungku dayah agency and religious social capital on drug eradication in Aceh, Indonesia. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 23*(3), 210–222. https://doi.org/10.22146/jsp.51061

Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community*

Psychology, *41*(1–2), 127–150. https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

Rahmaini, A., & Suriyani, R. (2024). Pesantren dan arah masa depan pendidikan bahasa Arab. *Educalia: Journal of Educational Research*, *3*(2), 137-154. https://doi.org/10.56613/educalia.v3i2.337

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333-339.

Suwar, A., & Khairul Ichsan, W. (2024). Transformasi pendidikan Islam pesantren berbasis moderasi di era disrupsi. *Educalia: Journal of Educational Research*, *3*(2), 100-118. https://doi.org/10.56613/educalia.v3i2.334

Syamsuri, S., Johari, F., Ahmad, H. F., & Handayani, R. (2023). Five principles of pesantren as social capital to overcome the problems of economic business development at pesantren. *Society*, *11*(1), 173–192. https://doi.org/10.33019/society.v11i1.467

Szreter, S., & Woolcock, M. (2004). Health by association? Social capital, social theory, and the political economy of public health. *International Journal of Epidemiology*, *33*(4), 650–667. https://doi.org/10.1093/ije/dyh013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, *15*(2), 225–249. https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.